

Analisis Rantai Nilai Industri Komoditas Kelapa Sawit Di Kalimantan Selatan

by Dahniar Dahniar

Submission date: 18-Nov-2022 01:17PM (UTC+0700)

Submission ID: 1957564576

File name: Nilai_Industri_Komoditas_Kelapa_Sawit_Di_Kalimantan_Selatan.pdf (204.46K)

Word count: 3780

Character count: 23365

ANALISIS RANTAI NILAI INDUSTRI KOMODITAS KELAPA SAWIT DI KALIMANTAN SELATAN

Value Chain Analysis of Palm Oil Industry Commodities in South Kalimantan

Dahniar*, Arief Budiman, Rano Wijaya

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis /Universitas Lambung Mangkurat

Jalan Brigjen H. Hasan Basry Banjarmasin Kalimantan Selatan, Indonesia

* Surel korespondensi: dahniar@unlam.ac.id

Abstract. The study aims in term of upstream perspective: to find out and analyze the effort that should be undertake in order to address the difference of of the cost of production of fresh fruit bunches (FFB) by government regulations, oil palm farmers and the company, if there is no win-win solution effort. From the downstream perspective: to find out and analyze the duties of the businessman in term of the payment from the buying to the selling stage. This research study employed (1) field and (2) library research with qualitative and quantitative data. Quantitative data was analysed with value chain mapping in the upstream and downstream along with Judgment Sampling Purposive Sampling. Based on that criterion, the researchers decided to choose 2 samples, namely PT Buana Karya Bhakti palm oil company that sells Crude Palm Oil (CPO) and PT Gawi Makmur Kalimantan that sells Palm Kernel (PKO) in South Kalimantan. The value chain analyzes results show in term of upstream, the palm farmer should increase the quality of FFB which is indicated by the value of high-yield oil palm. Quality of FFB will greatly affect the quality of CPO and PKO resulting from the processing of FFB. Good of FFB product will greatly affect the value of the yield of palm oil, of which varieties of plants, plant maintenance, quality and procedures harvesting of FFB, transporting and processing in the factory. An understanding of Good Agriculture Practices is necessary for farmers to be able to produce high quality oil palm fruit. From downstream aspects: the palm businessman have a duty to paid at the time the operation began, it means since purchasing to sales process, based on Government Regulation No: 14/Permentan/OT.140/2/2013 concerning on pricing guidelines of FFB purchase palm oil plantation production

Keywords: value chain, CPO, palm kernel, palm oil, FFB

1. PENDAHULUAN

Sektor industri minyak kelapa sawit merupakan sektor prioritas di provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai penganda output maupun nilai penganda pendapatan di atas rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perkebunan kelapa sawit termasuk dalam sektor prioritas. Sampai dengan tahun 2015, jumlah perusahaan/perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kalimantan Selatan adalah sebanyak 64 buah. Keberadaan perkebunan dan perusahaan kelapa sawit di provinsi Kalimantan Selatan selama ini masih belum memberikan hasil yang optimal. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya rantai nilai (*value chain*) yang dapat memberikan *win-win solution* kepada semua pelaku bisnis di bidang kelapa sawit.

Pertama, dilihat dari segi hulusasi dimulai dari para pengusaha/ perkebunan kelapa sawit sudah wajib memenuhi berbagai macam syarat untuk mendapatkan kelengkapan izin dalam berusaha. Ditinjau dari para petani kelapa sawit, mereka dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) kelompok besar yakni petani plasma dan petani mandiri, yang keduanya

juga memiliki banyak masalah yang dihadapi, salah satunya dalam menghitung harga produksi yang merupakan pedoman didalam menentukan harga jual Tandani Buah Segar (TBS). Bagi para petani plasma dan petani mandiri, untuk menjual panen hasil kebun mereka hampir-hampir tidak mempunyai posisi tawar yang baik (*no bargaining power*) sehingga mereka berada pada posisi yang lemah. Kebijakan pemerintah daerah dalam penetapan harga TBS belum mengungkapkan secara jelas komponen biaya (*cost component*) yang diperhitungkan untuk menghitung harga TBS dari kelapa sawit tersebut.

Kedua, ditinjau dari sisi hilirisasi, maka keberadaan perusahaan/perkebunan kelapa sawit di provinsi Kalimantan Selatan yang terlibat sebagai pelaku bisnis utamanya dalam hal ini adalah bagi pengusaha/perkebunan kelapa sawit, hasil produksi yang dihasilkan selama ini, dan penjualan yang terjadi, maka dibebani dengan kewajiban perpajakan baik pajak pusat maupun pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan Nomor 28 Tahun 2009 yang resmi, disamping itu mereka juga diwajibkan untuk



membayar berbagai pungutan lainnya oleh pemerintah daerah setempat seperti sumbangan pihak ketiga (dari pengusaha/perkebunan kepada pemerintah daerah setempat), dan juga ditemukan adanya tumpang tindih (*overlapping*) dengan kewajiban perpajakan yang sudah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

Peran Pemerintah sangat mendukung perkebunan kelapa sawit yang sudah berkembang pesat sekarang ini, karena merupakan paru-paru dari ekosistem. Kelapa sawit (*Elaeis guineensis*) adalah tumbuhan agroindustri yang dapat dimanfaatkan sebagai minyak untuk memasak, industri kosmetik maupun sebagai bahan bakar.

Kelapa sawit dapat berkembang pertumbuhannya hingga 12 meter. Inti sawit atau kernel merupakan biji 2 dari kelapa sawit mengandung minyak inti dengan kualitas tinggi yang tergantung pada tingkat kematangan buah atau lama waktu buah matang. Ada 3 tipe buah kelapa sawit yaitu dura, tenera dan pisifera. Dapat dilihat dari gambar berikut ini



Gambar 1. Tipe buah kelapa sawit

Dari Gambar 1 di atas dapat dilihat bahwa dura merupakan sawit yang buahnya memiliki cangkang tebal sehingga dianggap memperpendek umur mesin pengolah namun biasanya tandan buahnya besar-besar dan kandungan minyak per tandannya berkisar 16%. Pisifera buahnya tidak memiliki cangkang, sehingga tidak memiliki inti (kernel) yang menghasilkan minyak ekonomis dan bunga betinanya steril sehingga sangat jarang menghasilkan buah. Tenera adalah persilangan antara induk Dura dan jantan Pisifera. Jenis ini dianggap bibit unggul sebab melengkapi kekurangan masing-masing induk dengan sifat cangkang buah tipis namun bunga betinanya tetap subur

Di dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dinyatakan bahwa provinsi Kalimantan Selatan termasuk dalam koridor 3 (tiga) yaitu sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil

tambang dan lumbung energi nasional. Energi yang dimaksud bukan semata-mata energi yang berasal dari fosil tetapi juga energi yang terbarukan (*bio fuel*). Salah satu sumber energi terbarukan itu bisa diolah dari buah kelapa sawit. Selain itu buah kelapa sawit dapat diolah oleh industri makanan, kosmetik dan berbagai industri lainnya. Sejak 10 tahun terakhir perkebunan kelapa sawit berkembang pesat di Kalimantan Selatan. Luas perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Selatan tahun 2015 yaitu 372.720 Ha (Tabel 1).

Tabel 1. Luas perkebunan kelapa sawit tahun 2015

Jenis Perkebunan	Luas (ha)	Persentase (%)
Perkebunan Rakyat	69.449	18,63
Perkebunan Besar Negara	4.906	1,32
Perkebunan Besar Swasta	298.365	80,05
Jumlah	372.720	100

Sumber: (<http://disbun.kalselprov.go.id/umum/kelapa-sawit.html>).

Jumlah perusahaan/kebun kelapa sawit yang terdaftar dan beroperasi di Kalimantan Selatan adalah 64 buah. Dengan keberadaan perusahaan dan perkebunan kelapa sawit di daerah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Potensi pendapatan asli daerah harus benar-benar diperhatikan untuk mencapai kemandirian fiskal. Potensi pendapatan asli daerah dapat digunakan untuk menentukan pencapaian target pendapatan yang akurat dan pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah tersebut, sesuai dengan tujuan yang mulia dari adanya otonomi daerah.

Penelitian lahan basah yang mengenai komoditas kelapa sawit ini untuk mengimplementasikan rantai nilai (*value chain*), dimulai dari bagian hulu dan diakhiri dengan bagian hilir yang berkaitan dengan pelaku bisnis berbasis kelapa sawit di provinsi Kalimantan Selatan. Hasil penelitian ini akan menjadi pertimbangan untuk pihak-pihak terkait dalam menghasilkan *win-win solution*. Di dalam pelaku bisnis kelapa sawit, tidak semua pelakunya mempunyai posisi tawar (*bargaining power*) yang baik. Pemerintah sebagai fungsi regulator dan fasilitator sangat ditunggu kebijakannya yang lebih banyak berpihak kepada masyarakat luas, terutama kalangan masyarakat ekonomi lemah (kebijakan yang pro rakyat). Hal ini dibuktikan dengan belum adanya rantai nilai (*value chain*) yang dapat memberikan *win-win solution* kepada semua pelaku bisnis di bidang kelapa sawit.

Menurut (Pears and Robinson, 2009) "Analisis rantai nilai (*value chain analysis*) berupaya memahami bagaimana suatu bisnis menciptakan nilai bagi pelanggan dengan memeriksa kontribusi dari aktivitas-aktivitas yang berbeda dalam bisnis terhadap nilai tersebut."

Value chain dapat mengidentifikasi nilai pelanggan dapat ditingkatkan serta untuk memahami secara lebih baik hubungan perusahaan dengan pemasok (supplier), pelanggan, dan perusahaan lain. Sehingga dapat disimpulkan analisis rantai nilai merupakan suatu alat yang digunakan untuk menciptakan nilai bagi pelanggannya untuk mencapai suatu keunggulan yang kompetitif. Tujuan dari analisis *value-chain* adalah untuk mengidentifikasi tahapan *value chain*, perusahaan dapat meningkatkan *value* untuk pelanggan dan menurunkan biaya.

Metode Penetapan Harga Produksi TBS harga TBS merupakan salah satu indikator penting yang dapat mempengaruhi penawaran petani kelapa sawit. Kebijakan mengenai harga, misalnya mengenai harga TBS, merupakan wewenang pemerintah yang diturunkan dalam bentuk peraturan dan keputusan pejabat berwenang, seperti surat keputusan menteri (Permentan) atau pejabat (SK) yang diberi wewenang untuk itu. Kebijakan diambil dengan tujuan untuk melindungi petani dan menstabilkan perekonomian.

Tujuan dari pengaturan dan penetapan harga TBS yang sudah diatur dalam Permentan Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2013 adalah "memberikan perlindungan dalam perolehan harga wajar dari TBS kelapa sawit produksi petani dan menghindari persaingan tidak sehat diantara pabrik kelapa sawit. Pasal 4 Permentan Nomor 395 mengatur bahwa Pekebun menjual seluruh tandan buah segarnya kepada perusahaan dan perusahaan membeli seluruh tandan buah segar untuk diolah dan dipasarkan sesuai dengan perjanjian kerjasama."

Penelitian ini mendukung industri yang berkembang di lahan basah yaitu industri komoditi kelapa sawit, agar dapat diketahui nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan pada rantai nilai (*value chain*) tumbuh di lahan basah khususnya komoditi kelapa sawit. Informasi nilai tambah (*value added*) bagi pemerintah pada saat pra operasi, pada saat penjualan, dan nilai tambah untuk industri komoditi kelapa sawit pada fase produksi/TBS, fase pengolahan dan fase pasca produksi/penjualan.

Penelitian terkait yang sudah dilakukan terutama yang berkaitan dengan kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah dilakukan oleh peneliti (Nur Fatiah dan Dahniar, 2014) pada pemerintah provinsi Kalimantan Selatan yang berfokus pada

2

peranan perusahaan agribisnis dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai studi perbandingan pendapatan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil perbandingan penelitian yang dilakukan pada berbagai provinsi yang ada di Indonesia, ada beberapa peraturan daerah yang dibatalkan terkait dengan terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masing-masing, peneliti berpendapat hal ini mengakibatkan belum ditemukannya *win-win solution* bagi para pelaku bisnis kelapa sawit.

Penelitian lain yang ada kaitannya dengan penelitian juga telah dilakukan dilakukan oleh (Dahniar, et.al, 2011) pada Kabupaten Tabalong menunjukkan hasil bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam hal ini untuk memberikan alokasi dana yang lebih besar di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mengentaskan kemiskinan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin sangat bermanfaat, karena di kabupaten Tabalong ini juga terdapat beberapa kantong-kantong kemiskinan. Sebagian besar atau sekitar lebih dari 70% responden menyatakan bahwa mereka sangat terbantu dengan program-program kerja yang diluncurkan oleh Pemkab Tabalong selama ini. Oleh karena itu pada penelitian ini bertujuan menganalisis dari segi bagian hulu (hulusasi) usaha-usaha yang harus dilakukan dalam menyikapi perbedaan yang timbul dari penetapan harga pokok produksi Tandan Buah Segar (TBS) berdasarkan peraturan pemerintah, petani kelapa sawit dan pihak perusahaan/perkebunan, apabila tidak terjadi *win-win solution*. Serta menganalisis ditinjau dari sisi hilir (hilirisasi) tentang kewajiban para pengusaha/perkebunan, yang harus mereka bayar selama ini pada saat operasi mulai pembelian sampai penjualan.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian permasalahan dengan rantai nilai (*value chain*) dari hulusasi ke hilirisasi mengenai bisnis pembelian dan penjualan CPO (*Crude palm Oil*) dan inti kelapa sawit pada perusahaan / perkebunan agribisnis di Perkebunan Besar Swasta (PBS) khususnya pada PT Buana Karya Bhakti (BK) dan PT Gawi Makmur Kalimantan (GMK) yang bergerak di bidang kelapa sawit yang ada di Kalimantan Selatan.

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah *explanatory research*, penelitian yang tujuannya menjelaskan



abel-variabel yang diteliti dalam penelitian. Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*).

Unit analisis dalam penelitian ini adalah petani kelapa sawit baik petani plasma maupun petani mandiri (hulusasi), pengusaha serta pemerintah (hilirisasi). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan kelapa sawit yang berjumlah 64 buah pada 13 wilayah sampel penelitian sebanyak 2 buah perusahaan kelapa sawit. Teknik pengambilan sampel dengan metode *judgement/purposive sampling*. Kriteria pengambilan sampel yaitu :

1. Pemerintah daerah/wilayah kabupaten/kota yang ada memiliki perkebunan kelapa sawit.
2. Perusahaan/perkebunan kelapa sawit memiliki perizinan lintas wilayah yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu (KP2T) Kal-sel.
3. Perusahaan yang menjadi anggota Gabungan Pengusaha Kelapa Sawi Indonesia (GAPKI)
4. Perusahaan pemilik perkebunan kelapa sawit
5. Perusahaan pemilik pabrik pengolahan minyak sawit (*Crude Palm Oil/CPO*) dan sekaligus pemilik pabrik *refinery*-nya.

Atas dasar kriteria di atas maka didapatkan minimum sampel sebanyak 1 – 2 perusahaan di 2 (dua) wilayah yang berbeda yaitu : BKB yang hanya menjual CPO (*Crude Palm Oil*) dan GMK merupakan satu-satunya yang menjual Inti Sawit (*Palm Kernel*) di Kalimantan Selatan.

Sesuai dengan kesepakatan bersama antara petani kelapa sawit, pengusaha dan pemerintah, data dianalisis dengan rumus penentuan harga pembelian TBS sebagai berikut:

$$HTBS = K (HCPO \times RCPO + HIS \times RIS)$$

Keterangan :

HTBS = Harga TBS acuan yang diterima oleh Petani di tingkat pabrik, dinyatakan dalam Rp/kg dan merupakan harga pabrik pengolahan

K = Indeks proporsi yang menunjukkan bagian yang diterima oleh petani, dinyatakan dalam persentase dan ditetapkan setiap bulan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I berdasarkan Tim Penetapan Harga Pembelian TBS

HCPO = Harga rata-rata minyak sawit kasar (CPO) tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada bulan sebelumnya, dinyatakan dalam Rp/kg dan ditetapkan setiap bulan

RCPO = Harga rata-rata minyak sawit kasar (CPO) tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada bulan sebelumnya, dinyatakan dalam Rp/kg dan ditetapkan setiap bulan

HIS = Harga rata-rata tertimbang minyak inti sawit realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada bulan sebelumnya, dinyatakan dalam Rp/kg dan ditetapkan setiap bulan

RIS = Rendemen dari minyak inti sawit, dinyatakan dalam persentase dan ditetapkan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Aspek Hulusasi

Kebijakan pemerintah diambil dengan tujuan untuk melindungi petani dan menstabilkan perekonomian (Daniel, 2002). Harga penjualan yang dapat diperoleh petani ditentukan oleh berbagai faktor yaitu mutu, hasil, pengolahan hasil dan sistem pemasaran yang baik, sementara biaya produksi lebih mudah dikendalikan oleh petani dan salah satu faktor yang paling menentukan adalah produktivitas petani. PT Buana Karya Bhakti adalah perusahaan sawit yang hanya menjual CPO (*Crude Palm Oil*). Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi adalah ketersediaan dan harga input, produktivitas dan tenaga kerja dan kemampuan pengelolaan usaha tani untuk meningkatkan efisiensi (Simanjuntak, 2004).

Harga TBS ditentukan sistem penentuan harga menurut PP No. 14/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Perkebunan. Harga buah sawit (TBS) secara konsisten berkorelasi dengan harga CPO, hal ini dapat terjadi karena penetapan harga TBS memang mengacu pada harga CPO. Peningkatan harga CPO dan TBS menunjukkan harga bahwa nilai harga yang diterima oleh petani sawit (harga TBS) dapat dikatakan lebih tinggi dibandingkan nilai harga yang didapat para produsen CPO dan harga CPO (Rachman, 2005). Jumlah biaya dan pendapatan yang akan diperoleh sangat bergantung pada kondisi lahan, harga bahan dan alat serta upah tenaga kerja. Usaha tani merupakan suatu kegiatan produksi, dimana peran input dalam menghasilkan output menjadi perhatian utama. Peranan input bukan saja dilihat dari jenis dan ketersediaan dalam waktu yang tepat, tetapi juga dari segi efisiensi penggunaan faktor tersebut (Amang, 1995).

Usaha perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Selatan telah mengalami perkembangan secara signifikan. Sementara itu jumlah pabrik kelapa sawit di Kalimantan Selatan 20 pabrik dengan kapasitas yang terpakai ± 797,89 ton/jam. Keadaan ini tentunya akan menimbulkan lalu lintas produksi dan jual beli TBS dengan persaingan usaha yang semakin ketat dan terbuka.

Kondisi ini harus diikuti dengan peningkatan mutu TBS yang dihasilkan. Mutu dari TBS kelapa sawit ini akan sangat memengaruhi mutu minyak sawit (*Crude Palm Oil*, CPO) dan mutu minyak inti sawit (*Palm Kernel Oil*, PKO) yang dihasilkan dari pengolahan TBS. Hal yang harus diperhatikan dimulai dari proses budidaya yang baik (*Good Agriculture Practices/GAP*), pemanenan (*Good Handling Practices/GHP*) serta pengolahan yang baik (*Good Manufacturing Practices/GMP*). Produk TBS yang baik nantinya akan sangat mempengaruhi nilai rendemen kelapa sawit. Banyak faktor yang dapat memengaruhi rendemen; di antaranya varietas tanaman, pemeliharaan tanaman, mutu dan tatacara panen TBS, pengangkutan, serta proses pengolahan di pabrik.

Produk utama kelapa sawit adalah tandan buah segar. Produk ini diolah di pabrik kelapa sawit untuk diambil minyak dan intinya. Pengolahan tandan buah segar menjadi minyak sawit mentah dan inti sawit (kernel) yang bermutu baik adalah tujuan utama dari pengolahan. Guna mendapatkan CPO dengan mutu baik, pengolahan dilakukan menurut tahapan tertentu dengan sejumlah syarat pengolahan sesuai dengan GHP dan GMP yang sudah ditentukan sejak di lapangan hingga ke proses akhir. Kuantitas produksi TBS pabrik menjadi tolak ukur jumlah CPO dan PKO yang dihasilkan.

Harga TBS ditentukan oleh lamanya umur tanam dan tingkat kematangan dari buah kelapa sawit; semakin tua umur tanam, semakin tinggi harga TBS (Tabel 2). Hal lain yang menentukan harga TBS adalah nilai rendemen. Untuk mendapatkan rendemen tinggi, salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah pemeliharaan tanaman kelapa sawit. GAP (*Good Agriculture Practices*) harus dipahami oleh pekebun agar produksi buah sawit bermutu tinggi.

Tabel 2. Penentuan harga TBS periode Oktober 2015

No.	Umur Tanaman	Harga TBS (Rp)
1.	3 Tahun	1,428
2.	4 Tahun	1,598
3.	5 Tahun	1,729
4.	6 Tahun	1,789
5.	7 Tahun	1,881
6.	8 Tahun	1,924
7.	9 Tahun	1,955
8.	10 Tahun	2,011
9.	11 Tahun	2,012
10.	12 Tahun	2,012
11.	13 Tahun	2,013
12.	≥14 Tahun	2,014

Sumber : Disbun Banjarbaru 2016

3.2 Aspek Hilirisasi

BKB dan GMK adalah dua perusahaan besar yang menjadi mitra petani sawit untuk pengolahan minyak kelapa sawit khususnya perusahaan yang mengolah kelapa sawit menjadi minyak mentah (*Crude Palm Oil*) dan inti sawit (*Palm Kernel*). Lokasi perkebunannya di Kabupaten Tanah Bumbu Satui. BKB adalah perusahaan sawit yang menjual CPO ke perusahaan pengolah CPO melalui sebuah kontrak penjualan salah satunya ke perusahaan PT Wilmar Nabati Indonesia.

Harga CPO sesuai dengan volume penjualan untuk BKB dan GMK selalu berdasarkan kontrak. Untuk BKB menunjukkan hasil penjualan CPO untuk bulan Oktober sebesar Rp21.298 M sedangkan GMK sebesar Rp59.113 M (Tabel 3).

Tabel 3. Harga CPO (berdasarkan volume penjualan sesuai kontrak) Periode Oktober 2016

Nama PBS/N		BKB	GMK
Harga (Rp)	Minyak Sawit	8.305,00	8.629,70
	Inti Sawit	7.213,64	-
Volume penjualan (kg)	Minyak Sawit	2.000.000	6.850.000
	Inti Sawit	650.000	-
Jumlah nilai (Rp)	Minyak Sawit	16,610 M	59,113 M
		4,688 M	-
Hasil penjualan (Rp)		21,298 M	

Sumber : Disbun Banjarbaru 2016

4. SIMPULAN

Dari sisi hulu (hulusasi), usaha-usaha yang harus dilakukan dalam menyikapi perbedaan yang timbul dari penetapan harga pokok produksi Tandan Buah Segar (TBS) berdasarkan peraturan pemerintah, petani kelapa sawit dan pihak perusahaan/perkebunan, apabila tidak terjadi *win-win solution*, harus selalu mengacu pada Peraturan Pemerintah yang telah dibuat kesepakatan bersama dengan no: 14/Permentan/OT.140/2/2013 tentang pedoman penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit produksi perkebunan bukan ditentukan para pengepul dan pihak industri.

Dari sisi hilir (hilirisasi), kewajiban para pengusaha/perkebunan kelapa sawit, yang harus mereka bayar selama ini pada saat operasi, mulai pembelian sampai penjualan harga TBS sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 8 pasal 13 tahun 2013 tentang pedoman pembelian dan penjualan harga TBS dengan para pekebun kelapa sawit yang bermitra (dalam hal ini pada BKB dan GMK). Dengan adanya kemitraan permanen ini diharapkan adanya kesamaan persepsi antara petani plasma dan mandiri



, pengusaha dan pemerintah dalam memberlakukan penetapan harga dan kewajiban pajak yang harus dipenuhi.

Dari penelitian ini disarankan sebagai berikut.

1. Peran serta pemerintah sebagai regulator dan fasilitator sangat diharapkan untuk mendampingi petani khususnya petani plasma, jadi petani plasma tidak sekedar hanya sebagai obyek atau sekedar menaikkan harga posisi tawar petani, tetapi berusaha untuk bisa meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit baik petani sawit plasma maupun petani sawit mandiri.
2. Pengusaha yang mendominasi industri sawit yaitu para konglomerasi, yang selama ini menguasai kelapa sawit di bumi Kalimantan Selatan hendaknya harus selalu dilakukan pembinaan dan kontrol secara kontinyu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Perkebunan Kalimantan Selatan yang melakukan pertemuan secara rutin misalnya 3 bulan sekali untuk membahas berbagai hal.
3. Bagi pengusaha/perkebunan kelapa sawit, kewajiban untuk membayar pajak pusat dan pajak daerah harus mengacu dengan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan Nomor 28 Tahun 2009 yang resmi. Sedangkan kewajiban untuk membayar berbagai pungutan lainnya oleh pemerintah daerah setempat harus disesuaikan dengan kewajiban perpajakan yang sudah ditetapkan dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku, seperti kewajiban untuk membayar sumbangan kepada pihak ketiga (dari pengusaha/perkebunan kelapa sawit kepada pemerintah daerah setempat) sehingga meminimalisir terjadinya tumpang tindih (*overlapping*) dalam membayar pajak.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Dinas Perkebunan Kalimantan Selatan di Banjarbaru yang telah memfasilitasi pertemuan antara petani kelapa sawit, perusahaan kelapa sawit serta pemerintah daerah sehingga mempermudah peneliti untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai komoditas kelapa sawit yang ada di Kalimantan Selatan. Terima kasih juga untuk BKB dan GMK yang menjadi obyek dalam penelitian ini.

Pihak yang mendanai penelitian lahan basah ini dari PNPB Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Kepada semua tim peneliti yang solid terima kasih atas kerjasama yang baik, kesediaan waktu untuk berdiskusi sharing pendapat, serta biaya sehingga bisa menyelesaikan penelitian ini tepat waktu.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Dahniar et al. (2011). *Analisis Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabalong dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin*. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat.
- Darise, N. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dinas Perkebunan Kalimantan Selatan. (2016). *Agenda Rapat Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Periode Oktober 2016*, Banjarbaru: Dinas Perkebunan Kalimantan Selatan.
- Friska, S. (2010). *Value Chain Analysis (Analisis Rantai Nilai) Untuk Keunggulan Kompetitif Melalui Keunggulan Biaya*, USU Medan, *Jurnal Ekonomi* 13(1).
- Mowen, H. (2006). *Akuntansi Biaya* (Terjemahan), Jakarta: Salemba Empat.
- Mulyadi, (2007). *Akuntansi Biaya*, Jakarta: Salemba Empat.
- McMillan, J.H. & Schumacher, S. (2001). *Research In Education a Conceptual Introduction*. 5th Edition. New York: Addison Wesley Longmen Inc.
- Fatihah, N. & Dahniar. (2014). *Peranan Perusahaan Agribisnis dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Selatan (Perbandingan Pendapatan Pemerintah Pusat dan Daerah)*. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat.
- Pears & Robinson. (2009). *Theory of Value Chain*, Singapore: Prentice Hall.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 / Permentan / OT.140/2/2013
- Sekaran, U. (2009). *Metode Penelitian untuk Bisnis, Edisi 4 Buku 1 & 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Shank & Govindarajan. (2000). *Theory of Value Chain*, Singapore: Prentice Hall.
- Supriyono. (2003). *Akuntansi Biaya*, Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Jakarta.
- Womack, J. et al. (1990). *Theory of Value Chain*, Jakarta: Prentice Hall.

Analisis Rantai Nilai Industri Komoditas Kelapa Sawit Di Kalimantan Selatan

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.slideshare.net Internet Source	2%
2	journal.feb.unmul.ac.id Internet Source	2%
3	repository.uhn.ac.id Internet Source	2%
4	strategika.wordpress.com Internet Source	1%
5	snllb.ulm.ac.id Internet Source	1%
6	Badrus Zaman, Wiharyanto Oktiawan, Mochtar Hadiwidodo, Endro Sutrisno, Purwono, Irawan Wisnu Wardana. "Potential application of biodrying to treat solid waste", E3S Web of Conferences, 2018 Publication	1%
7	core.ac.uk Internet Source	1%

8	researchinlanders.be Internet Source	1 %
9	the-xinn-love.blogspot.com Internet Source	1 %
10	eprints.umm.ac.id Internet Source	1 %
11	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1 %
12	www.ipard.com Internet Source	1 %
13	makassar.tribunnews.com Internet Source	1 %
14	repository.ub.ac.id Internet Source	1 %
15	scholar.unand.ac.id Internet Source	1 %
16	zadoco.site Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On